

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN ANAK-ANAK DESA TERPENCIL**

***THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN SUPORTING CHILDREN'S EDUCATION REMOTE VILLAGE***

Wahyudi<sup>1</sup>, Mahdiansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta / SMA Negeri 12 Malinau  
Email: yuddisonsm3t@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mendukung pendidikan Masyarakat Desa Terpencil melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan secara terstruktur. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model studi kasus pada Desa Long Pada Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau sebagai salah satu desa dengan kategori wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau terpencil. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah kepala desa, aparat desa, dan masyarakat Long Pada khususnya yang masuk usia sekolah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kondisi pendidikan di Desa Long Pada yang memiliki banyak masalah seperti kurangnya sarana-prasarana pendidikan dan putus sekolah. Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah antara lain sebagai motivator dengan memberikan motivasi kepada orang tua siswa dan anak-anak agar tetap rajin sekolah agar dapat meraih cita-cita, sebagai mobilisator yaitu menggerakkan masyarakat agar sadar dan peduli pentingnya pendidikan dengan cara saling membantu, dan sebagai fasilitator yaitu memberikan layanan pendidikan kepengurusan Surat keterangan tidak mampu dan surat rekomendasi untuk kepengurusan program Paket maupun program beasiswa "Desa Sarjana".

**Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pendidikan, Daerah Terpencil**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the role of the village government in supporting the education of remote village communities through various activity programs carried out in a structured manner. The type of research used is descriptive-qualitative with a case study model in Long Pada Village, Sungai Tubu District, Malinau Regency, as one of the villages in the 3T (frontier, outermost, disadvantageous) or remote area category. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The informants for this research were the village head, village officials, and the Long Pada community, especially those of school age. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be seen that the condition of education in Long Pada Village has many problems, such as a lack of educational facilities and school dropouts. The role of the village government in solving problems includes, among others, being a motivator, providing motivation to parents and children to remain diligent in school so they can achieve their goals, being a mobilizer, namely moving the community to be aware and concerned about the importance of education by helping each other, and being a facilitator. namely, providing management education services. Certificates of incapacity and letters of recommendation for management of the Package program and the "Desa Sarjana" scholarship program.*

**Keywords: Village Government, Education, Remote Village**

Wahyudi

***Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pendidikan Anak-Anak Desa Terpencil***

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan sebuah negara yang diawali dengan pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan mutu sumber daya manusia dapat meningkat apabila adanya jaminan hak masyarakat memperoleh pendidikan yang berdampak juga pada meningkatnya kesejahteraan. Kehidupan manusia tidak akan memiliki makna dan martabat tanpa pendidikan. Oleh karena itu, negara hadir dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang memberikan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 31 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional secara adil dan terbuka. Pendidikan nasional juga termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari tujuan negara Indonesia. Berbagai dasar hukum di atas dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penduduk Indonesia agar bisa meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan hidup (Falah & Hadna, 2022).

Pemerintah pusat sudah memperhatikan pendidikan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan warga negara mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Fatmawati., Mappincara & Habibah, 2019) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa tidak mampu, dan pendidikan bebas biaya hingga 12 tahun adalah beberapa program pemerintah. Namun, hal tersebut belum menjangkau semua anak Indonesia, sehingga belum memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Jumlah anak yang putus sekolah baik di dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia cukup tinggi. Laporan UNICEF dari tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 2,5 juta anak Indonesia, terdiri dari 600 ribu anak di SD dan 1,9 juta anak di SMP, tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah,

sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan sesuai target program wajib belajar dari pemerintah. Padahal pemerintah telah menargetkan program wajib belajar selama 12 tahun (Arsita, Syafruddin., & Ilyas, 2022).

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun dalam hal ini tidak dapat diabaikan adanya peran orang tua dan masyarakat sebagai mitra pendidikan yang mampu mendorong anak-anak agar tetap bersekolah. Berbagai problematika penyelenggaraan pendidikan di Indonesia hingga sekarang belum dapat terselesaikan seluruhnya (Kurnisar., Mulyadi., Rahmatullah, 2017). Pemerintah sudah mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana pendidikan, tetapi terkait dengan kesadaran akan pentingnya menempuh pendidikan masih perlu untuk diperbaiki oleh semua pihak (Pawestri, & Nugroho, 2017).

Tanggung jawab pemberian layanan pendidikan tidak hanya bergantung pada lembaga sekolah, tetapi perlu dukungan pihak lain (Mirna., & Rossa, 2021). Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 ayat (2) yang menguraikan berbagai tugas kepala desa antara lain sebagai pelaksana utama pemerintahan desa, menyusun program pembangunan desa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat agar maju dan berkembang (Setiawan, 2022). Salah satu tugas pemerintah desa yang berhubungan dengan pendidikan adalah turut serta memfasilitasi anak-anak yang mengalami kesulitan menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah tingkat atas (Hasdinawati., Syamsuddin., & Salman, 2022)

Pemberian layanan pendidikan oleh pemerintah desa berlaku pada seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah 3T atau daerah terpencil. Dilihat dari modal dasarnya, daerah terpencil memang tidak memiliki prasyarat yang lebih baik dibandingkan pada wilayah perkotaan (Firdaus, Sulfasyah, Nur,

2018). Daerah terpencil disebut juga *remote area*, karena wilayahnya terpisah jauh dengan wilayah lainnya, sehingga tidak dimungkinkan untuk menjangkau beberapa wilayah dalam satu kali perjalanan (Hermino & Arifin, 2020). Wilayah 3T memiliki keterbatasan baik dari segi pembangunan sarana-prasarana, akses jalan yang sulit, informasi dan internet, kualitas pendidikan, dan masalah karakter pada anak-anak. Daerah 3T memerlukan upaya khusus agar dapat sejajar dengan kemajuan di wilayah perkotaan (Puslitjakdikbud, 2018; Downes & Robert, 2018).

Salah satu daerah yang menjadi perhatian yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah adalah di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Desa Long Pada. Berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti dapat diketahui bahwa penyebab utama masyarakat Desa Long Pada memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah adalah faktor geografis dan faktor kemiskinan. Letak desa Long Pada secara geografis masuk pada wilayah terpencil yang jauh dari ibukota kabupaten. Infrastruktur yang dimiliki Desa Long Pada masih terasa kurang untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kemudian penduduk miskin yang ada di Desa Long Pada ditandai dengan rumah tinggal seadanya, pendapatan tiap keluarga yang tidak berimbang dengan besarnya pengeluaran, dan banyak pengangguran khususnya generasi muda (Nugroho & Vlorensius., 2018).

Artikel ini berupaya meneliti dengan cara memotret peran Pemerintah Desa Long Pada yang dijalankan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan layanan tambahan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari perwujudan hak anak Indonesia. Pemerintahan desa menjadi obyek penelitian karena keberhasilan suatu negara dimulai dari desa dengan diberikan hak pengelolaan dana desa hingga 1 milyar rupiah (Mirna, & Rossa, 2021). Sedangkan Desa Long Pada dipilih karena berada di wilayah terpencil dengan kondisi masyarakat yang sesuai dengan masalah penelitian.

Selama ini, penelitian yang ada hanya memunculkan peranan pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Namun belum sepenuhnya memunculkan peran pemerintah desa dalam memberikan layanan pendidikan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah desa tidak memanfaatkan dana desa sama sekali untuk bidang pendidikan. Padahal sesungguhnya keterlibatan desa tidak hanya pada pembangunan infrastruktur di wilayahnya, tetapi juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menempuh pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud melengkapi penelitian peranan institusi pemerintah dalam pendidikan dari sudut pandang pemerintah desa.

## METODE PENELITIAN

Artikel yang berjudul Peranan Pemerintah Desa dalam Memberikan Layanan Pendidikan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study research*). Penelitian kualitatif adalah upaya pengolahan data menjadi deskripsi tulisan yang dapat dijelaskan dan dapat dimengerti oleh khalayak umum. Peneliti dapat menemukan dan mengembangkan permasalahan kualitatif setelah terjun langsung di lokasi penelitian. Sedangkan pendekatan studi kasus diperlukan untuk menggali fenomena tertentu dalam suatu waktu secara mendalam untuk mendapatkan keunikan pada lokasi yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Artikel ini mengambil kasus penelitian pada Desa Long Pada, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau yang masuk daerah terpencil. Peneliti mengambil populasi anak-anak usia sekolah di Desa Long pada dengan sampel penelitian siswa di Sekolah Menengah yang dipilih secara acak. Sumber data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara dengan berbagai informan di Desa Long Pada antara lain kepala desa, tokoh masyarakat dan pendidik maupun pelajar setempat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui studi pustaka yaitu buku-buku terkait dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional.

Kegiatan penelitian diawali dengan menemukan masalah penelitian umum, kemudian mencari jawaban pada lokasi khusus. Kemudian membuat instrumen penelitian kualitatif yang terdiri dari beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dipakai oleh peneliti terdiri dari tiga jalur kegiatan secara bersamaan yaitu: (1) penyederhanaan data terdiri dari penyederhanaan data melalui seleksi data yang ketat, uraian singkat, penggolongan data dalam satu pola, dan sebagainya; (2) penyajian data dapat berupa berbagai jenis matrik, grafik, tabel, jaringan, dan diagram untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diolah oleh peneliti; dan (3) penarikan kesimpulan diperlukan verifikasi sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibel dan objektif (Cohen., Manion., & Morrison, 2018).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dalam artikel ini merupakan tindakan yang di jalankan oleh Pemerintah Desa Long Pada yang disahkan oleh kepala desa sebagai program rencana program strategis. Peran pemerintah desa dalam mendukung layanan pendidikan masyarakat di dapat dilihat melalui visi dan misi kepala desa. Kemudian visi misi dijabarkan melalui rencana program strategis selama kurun waktu satu tahun anggaran (Raharjo, 2022). Berikut adalah hasil penelitian yang didapatkan peneliti melalui berbagai teknik pengambilan data, kemudian dibahas dengan telaah kritis berdasarkan penelitian empiris yang pernah ada terkait berbagai peran pemerintah desa sesuai program kerja dan realita pelaksanaannya dalam memberikan layanan pendidikan yang menyentuh semua anak Indonesia.



**Gambar 1.** Potret Desa Long Pada

#### Kondisi Pendidikan di Desa Long Pada

Pada bagian ini peneliti memotret kondisi pendidikan di Desa Long Pada, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau yang memuat beberapa informasi mengenai demografi anak usia sekolah dan kondisi sekolah di berbagai jenjang yaitu TK/PAUD, SD, SMP dan SMA. Peneliti juga masih mendata warga Desa Long Pada yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah, baik itu di wilayah Kalimantan Utara maupun di provinsi lainnya.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari data pemerintah Desa Long Pada, dapat diketahui bahwa Desa Long Pada termasuk desa yang kecil, karena hanya terbagi menjadi 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT) dan memiliki jumlah warga 177 jiwa. Sebagai ibukota Kecamatan Sungai Tubu, Desa Long Pada terdapat sekolah berbagai jenjang yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak berkolah	Jumlah Anak tidak bersekolah
PAUD/TK	4	0
SD	26	0
SMP	18	1
SMA	17	2
Jumlah	65	3

Tabel 1. Partisipasi pendidikan anak di Desa Long Pada

Berdasarkan data partisipasi pendidikan anak di Desa Long Pada dapat diketahui bahwa desa ini hanya memiliki sedikit penduduk. Daru data penduduk usia sekolah menunjukkan bahwa jumlah anak usia sekolah atau yang berumur 5-20 tahun adalah 68 jiwa, sedangkan jumlah anak yang sedang bersekolah dari jenjang TK – SMA adalah 65 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua anak di Desa Long Pada bersekolah sesuai program wajib belajar 12 tahun. Kemudian juga dari hasil penelusuran peneliti diketahui bahwa terdapat 7 anak Long Pada yang sedang menempuh pendidikan tinggi

(DIII dan S1) di berbagai lokasi wilayah Kalimantan baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini menandakan tingkat partisipasi masyarakat Desa Long Pada atas pendidikan sangat baik yang disebabkan oleh dorongan pemerintah desa, kesadaran orang tua dan program Desa Sarjana Malinau sebagai mempersiapkan generasi muda yang berpendidikan tinggi.



**Gambar 1.** Upacara gabungan di Desa Long Pada

### **Peran Pemerintah Desa sebagai Motivator**

Peran pemerintah desa dalam mengelola dan membina masyarakatnya dalam hal pelayanan pendidikan sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat. Demi memajukan masyarakat, peran pemerintah desa dalam menangani putus sekolah sangat penting. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini, masih ada berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat putus sekolah. Pemerintah desa harus berpartisipasi secara aktif dalam menghentikan anak putus sekolah agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan pendidikan. Salah satu tugas pemerintah desa adalah mendorong masyarakat untuk lebih menyadari pentingnya pendidikan..

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis melaksanakan wawancara kepada informan kunci yaitu kepala desa setempat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Long Pada, menjelaskan sebagai berikut:

*“Saya berupaya memberi perhatian dengan mendorong kepada para wali murid maupun anak-anak usia sekolah baik dalam suatu rapat desa maupun dalam percakapan biasa. Sering saya mengecek berbagai kendala perihal*

*pendidikan dan beri motivasi kepada orang tua agar menajamin anaknya tetap bersekolah”*(Wawancara,tanggal 2 Oktober 2023).

Pernyataan dari kepala desa Long Pada diperkuat oleh pendapat dari tokoh masyarakat setempat yang mengatakan sebagai berikut:

*“...Memang betul, saya diberi dorongan oleh Bapak Kade, kalau kami dua ketemu. Bap kades menanyakan apakah anak-anak masih rajin datang ke sekolah. Saya juga diberi nasehat agar tidak terlalu membebani anak dalam kerepotan rumah, supaya mereka fokus belajar di sekolah...”* (Wawancara tanggal 3 Oktober 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan. Hal ini juga diperkuat oleh temuan peneliti, yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Long Pada serius menangani masalah putus sekolah dengan mengadakan pertemuan secara formal dan informal untuk mendorong mereka. Tokoh masyarakat dan pemimpin desa sering mengungkapkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak agar mereka dapat memperbaiki nasib mereka sendiri. Pemerintah desa hanya menggunakan dorongan atau nasehat kepada masyarakat untuk memberikan motivasi yang berkelanjutan.

Namun demikian, kepala desa sebagai manusia biasa tentu memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pesannya kepada masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa keluarga yang belum termotivasi untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya. Pemerintah desa dapat membantu meningkatkan pendidikan, terutama masalah putus sekolah yang merupakan masalah pokok pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai motivator, terutama dalam mengurangi angka putus sekolah sudah berjalan baik, meskipun masih ada beberapa orang yang belum bisa melakukannya. Penelitian di Desa Long Pada menemukan bahwa peran kepala desa sebagai motivator sangat penting. Penelitian yang dilakukan oleh Syam &

Ramlawati (2017) menemukan bahwa pemerintah desa memiliki fungsi dan wewenang untuk memberikan pengarahan yang positif kepada warga terkait berbagai kebijakan pemerintah.

### **Peran Pemerintah Desa sebagai Mobilisator**

Hasil penelitian di Desa Long Pada menunjukkan bahwa pemerintah desa juga berfungsi sebagai mobilisator yaitu mendorong semua orang di desa untuk peduli dan sadar akan pentingnya pendidikan untuk semua anak. Oleh karena itu, setiap bagian masyarakat harus memiliki kepedulian untuk saling membantu demi kepentingan bersama. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) akan memastikan kemajuan suatu wilayah di masa depan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Long Pada Kecamatan Sungai Tubu mengatakan bahwa:

*“...Saya berdiskusi dengan tokoh masyarakat yang juga pejabat di pemerintahan, agar bersedia membantu anak dari keluarga miskin untuk bisa sekolah. Bantuan itu bisa berupa materi langsung ataupun memberikan informasi dan cara untuk memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah Malinau. Ajakan saya ini mendapat respon yang positif dari tokoh masyarakat tersebut (Wawancara tanggal 5 Oktober 2023).*

Hal ini sesuai pengakuan hasil wawancara dengan keluarga yang tidak mampu yang mengatakan bahwa:

*“...Kami adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Penghasilan sedikit, tetapi kebutuhan sekolah itu banyak. Tetapi saya merasa lebih lega karena adanya bantuan uang sekolah dari beberapa tokoh masyarakat, sehingga bisa meringankan biaya membeli kebutuhan sekolah...”*  
(Wawancara tanggal 28 Oktober 2023).

Hasil wawancara dengan berbagai informan di atas cukup membuktikan bahwa pemerintah desa telah melakukan segala upaya untuk memberikan layanan pendidikan untuk

semua masyarakat. Peneliti sadar bahwa peran pemerintah desa sangat penting dan diperlukan dalam menangani berbagai kendala selama bersekolah. Selain itu, pemerintah desa harus memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat tentang cara mempertahankan dan mengutamakan pendidikan anak-anak. Pemerintah desa sebisa mungkin memberi tahu semua orang bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam memberikan akses pendidikan untuk semua anak Indonesia (Kurnisar., Mulyadi., & Rahmatullah, 2017).

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dapat memberikan motivasi yang efektif. Namun, tidak semua masyarakat menyadari bahwa semua orang harus mendidik anak. Hasil penelitian di Desa Long Pada sejalan dengan hasil penelitian Nugroho, & Pawestri (2018) Pawestri & Nugroho (2017), yang menyimpulkan bahwa masyarakat harus terlibat dalam mendukung kebijakan kepala desa untuk menjamin hak anak belajar 12 tahun.

### **Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator**

Penelitian tentang peran pemerintah desa dalam mendukung layanan pendidikan di Desa Long Pada sebagai daerah terpencil, menunjukkan bahwa pemerintah desa bersedia memberikan surat keterangan miskin atau tidak mampu yang bisa digunakan sebagai syarat pengajuan beasiswa dan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pemerintah Desa Long Pada berkomitmen untuk mendukung program "Desa Sarjana" yang dirancang oleh pemerintah kabupaten Malinau. Program ini memiliki tujuan agar setiap desa memiliki anak-anak yang mampu bersekolah hingga lulus perguruan tinggi, kemudian kembali ke kampung untuk mengabdikan ilmunya.

Selain itu pemerintah desa juga mengupayakan anak-anak yang terpaksa putus sekolah supaya mengikuti pendidikan alternatif yaitu pada program paket B dan C. Program ini diselenggarakan secara berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang juga berupaya keras memberikan layanan pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil

wawancara dengan Sekertaris Desa Long Pada menuturkan bahwa:

*“...Dari data pemerintah Desa Long Pada, itu terdapat beberapa warga yang putus sekolah beberapa tahun yang lalu dan saat ini usianya sudah masuk 30an tahun. Saya arahkan mereka untuk mendaftar Paket B untuk yang belum lulus SMP, dan Paket C bagi yang belum lulus SMA. Saya rasa itu adalah solusi pemerintah yang baik untuk tetap memberikan layanan pendidikan disaat umur sudah tidak memenuhi syarat jika masuk sekolah formal. Kemudian memang benar ada program Pemda yaitu “Desa Sarjana”, tetapi kami tidak bisa memberikan bantuan keuangan karena dana desa belum dianggarkan untuk urusan pendidikan. Hal ini diluar tanggung jawab kami. Meskipun demikian kami tetap memberikan layanan dengan cara memfasilitasi anak-anak sekolah untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu bagi siapa saja yang meminta agar memudahkan mereka mendapatkan beasiswa di sekolah. Surat tidak mampu juga dapat digunakan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah dalam program Desa Sarjana...”* (Wawancara tanggal 2 November 2023).

Penelitian di atas menunjukkan bahwa ada anak yang terpaksa putus sekolah tetapi tetap ingin belajar dan mengikuti program Paket. Cara pemerintah desa membantu anak-anak yang membutuhkan menempuh pendidikan Paket dan akses pendidikan jenjang yang lebih tinggi adalah dengan memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Menurut temuan dari wawancara dengan salah satu anak yang termasuk dalam kategori miskin, mengatakan bahwa:

*“...Saya memerlukan bantuan beasiswa untuk meringankan biaya sekolah. Kemudian saya mengurus surat keterangan tidak mampu dikantor desa bulan Agustus tahun ini sebagai syarat pengajuan beasiswa Kaltara Unggul...”* (Wawancara tanggal 3 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak dengan memberikan kemudahan bagi anak sekolah yang mengurus beasiswa. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari laporan lapangan, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa sepanjang tahun 2023 telah memberikan surat keterangan kepada sejumlah siswa yang tidak mampu. Tujuannya adalah untuk memberi mereka kemudahan untuk mendapatkan bantuan pendidikan di sekolah, baik di jenjang SD, SMP, SMA, maupun S1. Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu siswa jenjang SMP yang mendapat kartu Indonesia Pintar (KIP) mengatakan bahwa:

*“...saya memporel KIP ini sejak masih duduk di Sekolah Dasar dan itu saya diuruskan oleh aparat desa melalui surat keterangan tidak mampu. Kartu ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami yang miskin...”* (Wawancara tanggal 3 November 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha mendorong anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data observasi, wawancara, dan dokumen menunjukkan bahwa banyak anak-anak di Desa Long Pada mendapatkan KIP dengan bantuan pemerintah desa. Hasil temuan peneliti di Desa Long Pada ini selaras dengan hasil penelitian oleh Hasdinawati., & Syamsuddin (2022) yang memberikan kesimpulan bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses administrasi masyarakat dalam rangka memenuhi persyaratan urusan pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Desa adalah satuan lembaga pemerintahan paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah desa adalah pihak yang paling tahu dan memahami berbagai permasalahan warganya, khususnya dalam bidang pendidikan. Pemerintah desa dapat berperan penting untuk ikut menjalankan amanat Undang-Undang dan berbagai program pendidikan pemerintah seperti wajib belajar 12 tahun. Desa Long Pada yang berlokasi di daerah terpencil memiliki problematika

pendidikan yang membutuhkan turut sertanya pemerintah desa untuk membantu memberikan tindakan dan solusi. Peran pemerintah Desa Long Pada dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat sudah terlihat nyata dalam berbagai bentuk. Peran Pemerintah Desa Long Pada antara lain sebagai motivator memberikan motivasi kepada orang tua siswa dan anak-anak agar tetap rajin sekolah agar dapat meraih cita-cita. Sebagai mobilisator yaitu menggerakkan masyarakat agar sadar dan peduli pentingnya pendidikan dengan cara saling membantu. Terakhir sebagai fasilitator yaitu memberikan layanan administrasi pendidikan yang mudah dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsita, I., Syafruddin., & Ilyas, M. (2022). Anak putus sekolah. (studi kasus di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 43–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jidiksiam.v9i1.182>.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education (8th ed.)*. Routledge.
- Downes, N & Robert, P. (2018). Revisiting The Schoolhouse: A Literature Review On Staffing Rural, Remote and Isolated Schools In Australia 2004-2016. *Australian and International Journal of Rural Education*, 28(1), 31–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.3316/infor.mit.266568991636396>.
- Falah, A.1 & Hadna, A. (2022). Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, Terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>
- Fatmawati, N., Mappincara, A., & Habibah, S. (2019). Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. (studi kasus SMP Negeri 7 Makassar).. *Jurnal Ilmu Pendidikan Keguruan Dan Pembelajaran*, 3(2), 115–121. <https://ojs.unm.ac.id>.
- Firdaus, Sulfasyah, & Nur, H. (2018). Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 33–43. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1796>
- Hasdinawati., Syamsuddin., & Syufarma. (2022). Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Mendukung Kualitas Pendidikan di Desa Polewali. *Jurnal Ilmiah Administratia*, 13(1), 45–52.
- Hermiono & Arifin, I. (2020). Contextual Character Education for Students in The Senior High School. *European Journal of Educational Research*, 9(3), 1009–1023. <https://doi.org/https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.3.1009>.
- Kurnisar., Mulyadi., & Rahmatullah, E. (2017). Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pendidikan Formal di Desa Ulak Kembang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. (Studi Kasus Desa Ulak Kembang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Association Profession Of Pancasila And Sivic Education.*, 6(3), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jbti.vi2.4544>.
- Mirna, W., & Rossa, M. (2021). Pemanfaatan Dana Desa dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. (Studi Kasus Gampong Beutong Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 537–544. <https://unduksha.ac.id/journal.php>
- Nugroho, E.D., & Vlorensus. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Long Bila Dan Desa Pulau Sapi Kabupaten Malinau Melalui Optimalisasi Potensi Lokal Melalui Revolusi Mental Mewujudkan Desa Mandiri Dan Melayani. *JPMB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 2(1), 2(1), 51–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/jpmb/v2i1.423>.
- Pawestri, A., & Nugroho, L. D. (2017).



- Penguatan Peran Pemerintah Desa Untuk Mendorong Kesadaran Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan Minimal 12 Tahun Sebagai Bagian dari Perwujudan Hak Anak (Study Pada Kabupaten Bangkalan). *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 10(2), 112–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.V1012.4145>.
- Puslitjakdikbud. (2018). *Model Penyelenggaraan Pendidikan untuk Daerah 3T berbasis Kearifan Lokal*. Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
- Raharjo, M. (2022). *Adminitrasi Pemerintah Desa di Indonesia, Teori, Regulasi, dan Implementasi*. Gama Media.
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintah Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Deepublish.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syam, A.B., & Ramlawati. (2017). Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Menekan Angka Putus Sekolah Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. *Jurnal Administratia*, 8(2), 95–110.